

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA

Oleh: Terry Irenewaty dan Aman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta selama ini; menemukan apa yang menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta; menemukan upaya sekolah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna. Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi ini genetik. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi interpretif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada standar/kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tergantung dari kesediaan sekolah itu sendiri. Pendidikan inklusif bisa diselenggarakan kalau sekolah merasa siap dan mampu menyelenggarakannya. Dinas pendidikan atau pemerintah tidak pernah memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Peranan Dinas Pendidikan Propinsi DIY sendiri adalah sebagai sentra pembina pelaksanaan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan mengusahakan guru khusus (guru pendidikan luar biasa) dan mendidik guru PLB agar siap diterjunkan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, selain itu Dinas Pendidikan juga mendidik guru-guru umum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka lebih siap dalam mendidik siswa dikelas inklusif yang notabene mempunyai siswa heterogen. Kendala-kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada empat. Pertama, kendala-kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana-prasarana, dan kondisi keuangan. Kedua, yaitu psikologi baik dari masyarakat maupun guru. Ketiga, value yaitu penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keempat, power yaitu hambatan-hambatan dari penguasa, misalnya penguasa membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dengan melakukan sosialisasi keberbagai daerah mengenai pendidikan inklusif agar semua orang mengetahui dan paham mengenai pendidikan inklusif, sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki kelainan (cacat).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan pendidikan yang mulia itu hendaknya dijadikan motivasi untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai elemen pendidikan terutama pemerintah yang dalam hal ini, memegang peranan penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak anak-anak Indonesia yang sekarang ini tidak dapat menikmati suasana belajar di bangku sekolah. Tidak sedikit pula anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sama sekali karena alasan ekonomi yang kemudian diperparah lagi dengan mahalnya biaya pendidikan sekarang ini. Disini peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai pelindung terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Pemerintah seyogyanya membuat suatu kebijakan yang mana dalam kebijakan tersebut berisi mengenai solusi-solusi terbaik dalam mengatasi masalah pendidikan. Bukan hanya sebagai suatu kebijakan yang dijadikan

slogan semata, namun perlu ada tindakan riil agar masalah-masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara baik.

Disyiahkannya UU Sisdiknas tahun 2003, telah memberikan angin segar dan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan pasal 15 tentang Pendidikan Khusus yang menyebutkan bahwa “Pendidikan Khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Hal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman, reformasi kelembagaan yang melayani anak yang mempunyai kelainan telah banyak dilakukan. Pada masa sebelumnya bentuk kelembagaan yang melayani pendidikan anak yang berkelainan masih banyak yang bersifat segregasi atau terpisah dari masyarakat pada umumnya. Selama ini pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan yaitu Sekolah Luar Biasa/Sekolah Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu.

Sekolah Luar Biasa/Sekolah Berkelainan (SLB) sebagai lembaga pendidikan khusus tertua menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menampung berbagai jenis anak berkelainan, sedangkan Pendidikan Terpadu adalah sekolah biasa yang menampung anak yang berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Memasuki akhir milenium kedua, visi dan misi kelembagaan sudah cenderung kepada bentuk integrasi. Suatu bentuk dimana anak luar biasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Munculnya berbagai bentuk istilah yang berhubungan dengan bentuk kelembagaan dan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kelainan seperti *Normalisasi* dan *Integrasi Mainstreaming, Least*

Restrictive Environment, Institusionalisasi dan Inklusif. Dewasa ini inklusif merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak yang berkelainan yang dipandang ideal untuk dilaksanakan. Di sekolah inklusif, siswa memiliki kemampuan heterogen karena peserta didiknya disamping anak-anak normal juga anak-anak yang berkelainan baik secara fisik, sosial, emosional dan sensoris neurologis (http://www.geogle.com/kelas_inklusif.htm, diakses tanggal 12 Oktober 2006).

Kegiatan belajar merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum, dan keberhasilan dari proses belajar mengajar bisa dilihat dari mutu pendidikan atau lulusan. Tidak terkecuali di kelas inklusif dimana anak-anak yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki sama dengan anak-anak normal lainnya, karena pada dasarnya mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu komunitas.

Hal ini yang menarik untuk disoroti, bawasanya pembelajaran di kelas inklusif yang siswanya heterogen dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda, perilaku, aktivitas, kemampuan dan kreativitas yang dimiliki mereka mampu melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi siswa maupun guru untuk bisa berhasil dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah yang kebanyakan dilakukan melalui strategi ekspositori yaitu keterlibatan pengajar secara penuh terhadap proses pembelajaran (Ibrahim, 2003: 34). Maka dari itu perlu ada inovasi pembelajaran dimana daya kreativitas guru sangat dibutuhkan. Bagaimana cara memotivasi siswa, tanggapan siswa terhadap materi yang diberikan, perilaku siswa dalam kelas, pemberian umpan balik, evaluasi sampai dengan hasil belajar yang diperoleh menjadi tantangan tersendiri. Artinya diperlukan paradigma baru dari pembelajaran yang berpusat pada guru atau *teacher oriented*, kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau *student oriented*.

Banyak sekali hal yang perlu dibenahi dalam pembelajaran sejarah, misalnya pembelajaran sejarah yang lebih mengutamakan hafalan fakta-fakta

perlu mendapat perhatian yang serius, karena hal ini akan menimbulkan rasa bosan dikalangan siswa sehingga siswa malas untuk belajar sejarah. Proses pembelajaran sejarah yang selalu mengedepankan aspek kognitif dan afektif hendaknya juga perlu dibenahi, karena aspek psikomotor juga perlu dilibatkan dalam pembelajaran sejarah.

Bukan hanya itu saja, proses pembelajaran tidak akan kondusif jika tidak didukung oleh tempat belajar yang memadai, perpustakaan yang lengkap dan lingkungan belajar yang nyaman. Proses pembelajaran sebaiknya juga tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja tetapi juga di luar kelas agar siswa tidak jenuh. Selain itu, penggunaan media yang bervariasi juga harus dilakukan agar pelajaran mudah diterima siswa, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam, dan materi yang diajarkan oleh guru tidak mudah dilupakan oleh siswa.

Kurikulum sejarah 1994 untuk sekolah menengah pada umumnya juga masih terdapat kekurangan. Seperti materi pelajaran sejarah yang sangat luas harus diselesaikan dalam waktu yang relatif terbatas. Hal ini menyebabkan materi pembelajaran sejarah hanya dipelajari secara singkat karena guru harus mengejar target agar materi dapat diselesaikan tepat waktu.

Guru sebagai bagian terpenting dari proses pembelajaran, disamping harus mempunyai kompetensi sebagai guru profesional, seorang guru hendaknya juga harus dapat menjadikan profesinya tersebut sebagai suatu tugas mulia yang diembannya. Fenomena sekarang ini banyak yang memperlihatkan bahwa pekerjaan sebagai seorang pendidik hanya dilakukan setengah hati sehingga hal ini banyak merugikan siswa. Seperti contohnya datang ke sekolah semaunya, bahkan kadang guru meninggalkan jam pelajaran, dan siswa hanya diberi tugas saja. Hal ini lah yang perlu diperbaiki, agar kinerja guru bisa maksimal dan apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu reformasi dalam proses pembelajaran perlu dilakukan, agar tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari berbagai

pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan seperti kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, dan lain sebagainya.

Usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi mereka yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa untuk memperoleh kesempatan belajar sama dengan siswa normal lainnya. telah dilakukan di beberapa sekolah di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta seperti SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, SMA 5 Yogyakarta, MAN I Sleman, dan lain sebagainya telah menempatkan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa untuk belajar bersama, membaaur dan berinteraksi dengan siswa normal lainnya. Kenyataan di lapangan telah memberikan indikasi bahwa ternyata ada keberhasilan yang diperoleh pihak sekolah yaitu kelainan atau kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh anak tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk dapat berprestasi.

Penyelenggaraan pendidikan kelas inklusif ini boleh jadi merupakan terobosan baru untuk mengatasi masalah pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa tanpa harus ada segregasi atau pemisahan dengan anak normal lainnya. Penting untuk diketahui bahwa keberadaan kelas inklusif dapat menciptakan suatu sistem pendidikan moral bagi siswa agar mampu mengkondisikan diri terhadap lingkungan yang kompleks dimana keberagaman karakteristik siswa bisa membawa kearah pendidikan budaya baru yang lebih modern.

Penelitian ini sangat penting dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu. Penelitian-penelitian terdahulu terutama mengenai implementasi kelas inklusif dalam proses pendidikan memberikan inspirasi untuk pelaksanaan penelitian ini. Di masa yang akan datang setelah dilakukan penelitian fundamental ini, maka diharapkan muncul penelitian-penelitian terapan baik dalam bentuk *research and depelovment*, maupun *action research*, yang berfungsi mengembangkan sistem pembelajaran kelas inklusif baik dalam skala makro maupun mikro.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta selama ini?
2. Apakah yang menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya sekolah untuk menindaklanjuti kendala-kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian kebijakan ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta selama ini.
- b. Menemukan apa yang menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta.
- c. Menemukan upaya sekolah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberi masukan yang berguna pada pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional untuk mengintensifkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai pendukung program perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
- b. Memberi masukan yang penting pada daerah, dinas pendidikan kota/kabupaten, sekolah, sampai ke tingkat guru untuk mendukung program pendidikan inklusif dengan mengembangkan sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumberdaya selebihnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Istilah inklusif adalah falsafah pendidikan dan menjadi bagian dari keseluruhan, dimana anak-anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak yang berkelainan. Landasan yuridis mengenai pendidikan inklusi yakni sebagai berikut.

1. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31

Ayat (1) “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Ayat (2) “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi baik secara fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya dan hal tersebut dapat terwujud melalui sistem pendidikan wajib 9 tahun. Penyelenggaraan pendidikan akan dapat dilaksanakan secara maksimal apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.

2. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa pendidikan diharapkan dapat menjadi upaya dalam membentuk manusia Indonesia yang memiliki potensi disegala bidang sehingga nantinya dapat menjadi motor penggerak bagi kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Sumber Daya Manusia yang unggul ini nantinya dapat membawa bangsa menuju ke dalam masyarakat yang mampu bersaing di dunia Internasional.

Pasal 5

Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

Ayat (2): Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Pendidikan diselenggarakan tanpa ada diskriminatif baik bagi anak yang berkelainan maupun bagi anak normal. Pendidikan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan khusus.

Pasal 32

Ayat (1): Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan.

Ayat (2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik didaerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal ini menjelaskan bahwa pendidikan khusus adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi semua siswa. Pendidikan khusus bukan hanya diperuntukan bagi siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan, namun juga bagi masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bab X – KURIKULUM

Pasal 36

Ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.

Dalam pasal 36 ayat (3) dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan disusun dengan memperhatikan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa harus terbebani dengan berbagai kebijakan yang mengikat.

BAB XII – Sarana-Prasarana Pendidikan

Pasal 45

Ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Dalam pasal 45 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal seyogyanya dapat menyediakan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Sarana prasarana tersebut hendaknya dapat memenuhi kebutuhan mereka, disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Pasal 51

Anak penyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 51 menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya untuk sebagian orang saja, tetapi untuk semua orang. Dalam hal ini termasuk bagi anak penyandang cacat juga diberi kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan tersebut bisa diperoleh di sekolah umum maupun di sekolah luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa tiap anak memiliki keunggulan dan prestasi baik dibidang akademis maupun bidang lainnya, berhak memperoleh kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus. Mereka diberikan suatu pelayanan khusus sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasinya.

Pasal 53

- a) Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dan keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- b) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Dalam pasal 53 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan dan pembiayaan pendidikan. Bantuan pelayanan dan pembiayaan pendidikan diberikan kepada mereka yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Hal ini dimaksudkan agar

masalah pendidikan yang dalam hal ini mengenai masalah pelayanan dan pembiayaan tidak menjadi sebuah kendala untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut termotivasi dalam menyukseskan pelaksanaan pendidikan.

b. UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C8/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003. Perihal pendidikan inklusi: menyelenggarakan dan mengembangkan disetiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK.

Dari pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu layanan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak yang memiliki kelainan untuk bisa belajar bersama dengan siswa normal di kelas reguler. Pendidikan inklusif ini seyogyanya diselenggarakan disetiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 sekolah.

c. Deklarasi Bandung (Nasional) "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" 8-14 Agustus 2004

- a) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi yang handal.
- b) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan

potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merupakan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.

- c) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
- d) Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
- e) Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun pro aktif dengan siapapun, kapanpun, dan di lingkungan manapun dengan meminimalkan hambatan.
- f) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan dan lainnya secara berkesinambungan.
- g) Menyusun Rencana Aksi (*action plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan berkebutuhan khusus lainnya.

d. Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005

- a) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “Pendidikan untuk semua” adalah benar-benar untuk semua.
- b) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam

komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan anak usia dini, prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi.

- c) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga Negara. Secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan bulan Juni 1994 bahwa “prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka”.

Pendidikan inklusif memiliki visi dan misi. Visi pendidikan inklusif adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang optimal untuk mencapai kemandirian bagi anak-anak berkelainan dan berkebutuhan khusus lainnya serta anak-anak yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Misi dari pendidikan inklusif itu sendiri adalah memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi anak yang berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, meningkatkan kepedulian dan memperluas jaringan tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, dan mewujudkan pendidikan inklusif secara baik dan benar di lingkungan masyarakat.

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena memudahkan guru dan administrator. Namun jika dilihat dari segi peserta

didik, sangat merugikan. Disebutkan oleh Reynolds dan Birch (1988), antara lain bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak yang berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofis model segregasi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berorientasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dari komunitas masyarakat biasa. Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segregatif relatif mahal (<http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu=profile&pro=42>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2006).

Pada pertengahan abad XX model yang muncul adalah model *mainstreaming*. Model ini memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Alternatif yang tersedia mulai dari yang sangat bebas (kelas biasa penuh) sampai yang paling terbatas (sekolah khusus sepanjang hari), model ini juga dikenal dengan model paling tidak terbatas (*the least restrictive environment*), artinya seorang anak berkelainan harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak terbatas menurut potensi dan jenis/tingkat kelainannya.

Pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan pendidikan yang layak bagi, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak bisa diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan dapat saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lainnya (<http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu=profile&pro=42>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2006).

Lain halnya dengan pendapat Staup dan Peck (1995) yang mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak

berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan kelas yang relevan bagi anak yang berkelainan. Sementara Sapon (1995) mengatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman sebayanya. Oleh karena itu, ditekankan adanya rekonstruksi dari sekolah, sehingga menjadi suatu komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak (<http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu=profile&pro=42>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2006).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi/kelas inklusif yaitu sistem pendidikan atau kelas dimana setiap anak berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa dapat belajar bersama dengan anak normal lainnya dalam satu kelas untuk dididik bersama agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi bahwa pada kenyataannya anak normal dan anak berkelainan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu komunitas.

Salah satu karakteristik terpenting dari kelas inklusif adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsive terhadap kebutuhan individu siswa. Sapon-Shevin seperti dikutip dari (<http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu=profile&pro=42>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2006). Berdasarkan hasil penelitian Sapon-Shevin, ada lima profil pembelajaran di kelas inklusif antara lain sebagai berikut.

- a. Pendidikan Inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, dimana guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas dimana anak ditampung secara penuh dengan menekankan saling menghargai perbedaan.
- b. Mengajar kelas heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar.

- c. Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif.
- d. Pendidikan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi, karena aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengajaran tim, kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai cara mengukur ketrampilan, pengetahuan dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak.
- e. Pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.

Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model antara lain *kelas reguler (inklusif penuh)* yaitu anak berkelainan bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler belajar dengan menggunakan kurikulum yang sama, *kelas reguler dengan cluster* yaitu anak berkelainan bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, *kelas reguler dengan pull out* yaitu anak berkelainan bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus, *kelas reguler dengan cluster dan pull out* yaitu anak berkelainan bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang belajar lain dengan guru pembimbing khusus, *kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian* yaitu anak yang berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler, *kelas khusus penuh* yaitu anak berkelainan belajar dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berada dalam kelas reguler setiap saat.

Setiap sekolah atau kelas inklusif dapat memilih model mana yang diterapkan terutama tergantung kepada jumlah anak yang berkelainan, jenis kelainan, tingkat kelainan, ketersediaan tenaga pengajar dan sarana-

prasarana yang tersedia. Sementara itu mutu lulusan dipengaruhi oleh proses belajar-mengajar dan mutu belajar-mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain diantaranya input siswa, kurikulum, tenaga pengajar, sarana-prasarana, dana, manajemen dan lingkungan. Dari kesemuanya itu merupakan sub-sistem dalam sistem pendidikan dan bila ada perubahan pada salah satu sub-sistem, maka menuntut perubahan komponen lainnya.

Oleh karena itu kelas inklusif merupakan salah satu bentuk pemerataan pendidikan bagi anak yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa agar bisa memperoleh kesempatan pendidikan dengan anak normal lainnya karena tidak dapat dipungkiri bahwa mereka merupakan bagian integral dari masyarakat. Keberhasilan utama dari pendidikan inklusif yaitu apabila ada kepedulian dari semua pihak serta adanya kerjasama dari semua pihak.

B. Kerangka Konseptual

Pendidikan inklusif ini merupakan terobosan baru untuk mengatasi masalah pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa tanpa harus ada segregasi atau pemisahan dengan anak normal lainnya. Hal yang dikaji di sini adalah bahwa keberadaan kelas inklusif dapat menciptakan suatu sistem pendidikan moral bagi siswa agar mampu mengkondisikan diri terhadap lingkungan yang kompleks dimana keberagaman karakteristik siswa bisa membawa kearah pendidikan budaya baru yang lebih modern. Untuk itu, diperlukan model belajar mengajar dan sistem evaluasi yang impresif agar tujuan pendidikan inklusif secara substansial dapat tercapai. Adapun rencana yang diusulkan dari hasil penelitian ini adalah diperluasnya akses pembelajaran inklusif untuk memberikan pelayanan pendidikan secara meluas terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, tanpa ada diskriminatif.

Bentuk-bentuk atau usaha-usaha sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi anak yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa

telah banyak dilakukan. Salah satunya dengan adanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebagai salah satu bentuk sekolah dimana anak-anak berkelainan mempunyai kesempatan belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya.

Pendidikan inklusif telah menjadi wahana baru bagi anak-anak berkelainan atau anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk meningkatkan potensi yang dimiliki tanpa harus dipisahkan dari masyarakat normal pada umumnya. Mereka pada dasarnya juga warga negara Indonesia yang juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Di kelas inklusif ini, system pendidikan menjadi sorotan utama dimana dalam sistem pendidikan ini, daya kreativitas dan inovasi pendidikan perlu dilakukan. Bukan hanya itu saja peran guru dan unsur-unsur penunjang pendidikan lainnya perlu mendapat perhatian untuk memperoleh hasil lulusan atau mutu lulusan yang dapat bersaing di dunia pendidikan sehingga pemerataan pendidikan bagi anak-anak berkelainan atau anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. Untuk mewujudkan hal tersebut seperti apa yang menjadi tujuan UU Sisdiknas 2003, maka perlu kerjasama dari berbagai elemen pendidikan.

Di tingkat sekolah, kepala sekolah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam program pendidikan. Program pendidikan di tingkat sekolah ini akan terlaksana apabila didukung oleh kesiapan input seperti halnya motivasi siswa dan guru, kurikulum pembelajaran, serta sarana pembelajaran yang memadai yang akan menjadi penunjang dalam proses pembelajaran. Latar belakang guru dan siswa yang berbeda-beda baik secara pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan agama juga akan berpengaruh terhadap proses dan hasil dari kegiatan pembelajaran baik positif maupun negatif. Jika sikapnya positif maka aktivitasnya pun tinggi, namun sebaliknya jika negatif maka aktivitasnya cenderung rendah.

Dari berbagai aktivitas yang terjadi selama proses pendidikan akan diketahui hasil dari pendidikan tersebut sehingga dapat diketahui apakah tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal atau tidak. Dengan demikian, maka

tepat apabila untuk melihat dan menemukan realitas yang sesungguhnya dari implementasi kelas inklusif ini dimulai dari menilai konteks-input-proses-output.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan konsep teoritik yang membahas mengenai berbagai metode atau ilmu metode-metode, yang dipakai dalam penelitian. Sedangkan metode merupakan bagian dari metodologi, yang diinterpretasikan sebagai teknik dan cara dalam penelitian, misalnya teknik observasi, metode pengumpulan sumber (heuristik), teknik wawancara, analisis isi, dan lain sebagainya. Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, maka jenis penelitian dengan strateginya yang cocok dan relevan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik (Muhadjir, 1996: 243).

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam proposal sebelum terjun ke lapangan, maka jenis strategi penelitian ini secara lebih spesifik dapat disebut sebagai studi kasus terpancang (*embedded case study research*)(Yin, 1987: 136).

Dengan mengenal dan memahami karakter penelitian kualitatif, dapat mempermudah peneliti dalam mengambil arah dan jalur yang tepat dalam

mengumpulkan data, menganalisis maupun mengembangkan laporan penelitian. Studi kasus didasarkan pada teknik-teknik yang sama dalam kelaziman yang berlaku pada strategi historis-kritis, tetapi dengan menambah dua sumber bukti yang signifikan yaitu observasi langsung dan wawancara sistemik. Meskipun studi kasus dan historis-kritis terjadi tumpang tindih, tetapi kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan beragam sumber (Noeng Muhadjir, 2004: 61).

Secara sistematis, penelitian kualitatif ini mempunyai karakteristik pokok sebagai berikut: Pertama, riset kualitatif mempunyai latar alami karena yang merupakan alat penting adalah adanya sumber data yang langsung dari perisetnya, maksudnya data dikumpulkan dari sumbernya langsung, dan peneliti merupakan instrumennya; kedua riset kualitatif ini bersifat deskriptif; ketiga periset kualitatif lebih memperhatikan proses dan produk yang bermakna; keempat, periset kualitatif cenderung menganalisa datanya secara induktif, maksudnya data yang dikumpulkan bukanlah untuk mendukung atau menolak hipotesis, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama; kelima, “makna” merupakan soal esensial perhatian utamanya (Noeng Muhadjir, 2005: 23).

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian kebijakan ini adalah semua yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Dalam hal ini yang menjadi subjek adalah para pengambil kebijakan pendidikan inklusif di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan kepala sekolah; para guru; dan para siswa yang terlibat dalam kegiatan pendidikan inklusif.

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berhadapan dengan data yang bersifat khas, unik, idiosyncratic, dan multiinterpretable (Waluyo, 2000: 20). Data yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif tidak bersifat nomotetik (satu data satu makna) seperti dalam pendekatan kuantitatif atau positivisme. Untuk itu, data-data kualitatif perlu ditafsirkan agar mendekati kebenaran yang diharapkan (Waluyo, 2000: 20). Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Informan atau nara sumber yang terdiri dari para pengambil kebijakan pendidikan inklusif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kepala dinas pendidikan, kepala sub-dinas PLB, ahli pendidikan inklusif, kepala sekolah, guru dan Siswa.
- 2) Tempat dan aktivitas implementasi pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, yang dalam hal ini adalah sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- 3) Teks yang berupa arsip dan dokumen resmi mengenai program pendidikan dan pengajaran, kurikulum, foto-foto situs studi kasus, dan catatan-catatan lain yang relevan. Dalam menafsirkan teks yang bermacam-ragam ini, diperlukan dekontekstualisasi (proses pembebasan dari konteks). Teks bersifat otonom yang didasarkan atas tiga hal, yaitu: maksud penulis; situasi kultural dan kondisi sosial pengadaan teks; dan untuk siapa teks itu ditulis. Seorang peneliti harus “membaca dari dalam” teks yang ditafsirkannya itu. Tetapi peneliti tidak boleh luluh ke dalam teks tersebut dan cara pemahamannya tidak boleh lepas dari kerangka kebudayaan dan sejarah dari teks itu. Karena itu distansi asing dan aspek-aspek subjektif-objektif dari teks-teks tersebut harus disingkirkan (Waluyo, 2000: 26).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Wawancara Mendalam (in-depth interviewing)

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Dalam hal ini, peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Dalam berbagai situasi, peneliti dapat meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan dapat menggunakan posisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya (Yin, 1996: 109).

Kelebihan mencari data dengan cara wawancara, dapat diperoleh keterangan yang tidak dapat diperoleh dengan metode yang tidak menggunakan hubungan yang bersifat personal. Semakin bagus pengertian pewawancara dan semakin halus perasaan dalam pengamatannya itu, semakin besar pulalah kemampuannya untuk memberikan dorongan kepada subjeknya. Lagi pula, semakin besar kemampuan orang yang diwawancarai untuk menyatakan responsnya, semakin besar proses intersimulasi itu. Tiap-tiap respons atau tanggapan yang verbal dan reaksinya dinyatakan dengan kata-kata dapat memberikan banyak pikiran-pikiran yang baru. Suatu jawaban bukanlah jawaban atas suatu pertanyaan saja, melainkan merupakan pendorong timbulnya keterangan lain yang penting mengenai peristiwa atau objek penelitian. Semakin besar bantuan responden dalam wawancara, maka semakin besar peranannya sebagai informan. Dalam hal ini, informan kunci seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang bersangkutan (Yin, 1996: 109).

Dengan demikian wawancara mendalam harus memberikan keleluasaan informan dalam memberikan penjelasan secara aman,

tidak merasa ditekan, maka perlu diciptakan suasana “kekeluargaan”. Kelonggaran ini akan mengorek kejujuran informasi, terutama yang berhubungan dengan sikap, pandangan, dan perasaan informan sehingga pencari data tidak merasa asing dan dicurigai. Oleh karena itu, maka masalah pelaksanaan wawancara perlu dipilih “waktu yang tepat”, maksudnya para informan diwawancarai pada saat yang tidak sibuk dan dalam kondisi yang “santai” sehingga keterangan yang diberikan memang benar-benar adanya. Namun demikian, peneliti perlu berhati-hati dari ketergantungan yang berlebihan kepada seorang informan, terutama karena kemungkinan adanya pengaruh hubungan antar pribadi. Suatu cara yang rasional untuk mengatasi kesalahan ini adalah dengan mengandalkan sumber-sumber bukti lain untuk mendukung keterangan-keterangan informan tersebut dan menelusuri bukti yang bertentangan sehati-hati mungkin.

2) *Observasi Langsung*

Observasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk observasi partisipasi pasif terhadap berbagai kegiatan dan proses yang terkait dengan studi (Sutopo, 1996: 137). Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati berbagai kegiatan belajar mengajar di kelas, dan bentuk-bentuk partisipasi mereka dalam pelaksanaan program pengajaran.

Observasi tersebut dapat terbentang mulai dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga yang tidak formal. Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti. Observasi dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang akan diteliti. Observasi tersebut bisa begitu berharga sehingga peneliti bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus untuk menambah keabsahan penelitian (Dabbs, 1996:113).

3) *Mencatat Dokumen (Content Analysis)*

Teknik ini sering disebut sebagai analisis isi (content analysis) yang cenderung mencatat apa yang tersirat dan yang tersurat. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip tentang pelaksanaan program posyandu dalam studi kasus penelitian ini.

Dalam psikologi, analisis isi menemukan tiga ranah aplikasi penting. Pertama adalah, analisis terhadap rekaman verbal guna menemukan hal-hal yang bersifat motivasional, psikologis atau karakteristik-karakteristik kepribadian. Aplikasi ini telah menjadi tradisi tentang pemanfaatan dokumen-dokumen pribadi, dan aplikasi analisis terhadap struktur kognitif. Aplikasi kedua adalah pemanfaatan data kualitatif yang dikumpulkan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan terbuka (Krippendoff, 1991:11). Di sini analisis isi memperoleh status teknis pelengkap yang memungkinkan peneliti memanfaatkan data yang hanya dapat dikumpulkan dengan cara yang tidak terlalu membatasi pokok bahasan dan menguji silang kesahihan temuan yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Aspek ketiga menyangkut proses-proses komunikasi dimana isi merupakan bagian integralnya (Krippendoff, 1991:11).

E. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *informant review* atau umpan balik dari informan (Milles dan Hubberman, 1992:453). *Informant review* dilakukan dengan melakukan umpan balik pada para informan setelah selesai mendeskripsikan hasil wawancara. Kegiatan pengolahan data ini dilakukan dengan dialog dalam rangka penemuan makna dalam artian penyamaan persepsi antara pemikiran peneliti dan apa yang dipikirkan oleh subyek. Setelah ada kesamaan persepsi tentang data yang telah dideskripsikan, maka data tersebut dapat dikatakan valid dan layak untuk dijadikan memo

untuk disajikan. Informant review ini dilakukan pada informan kunci atau informan lain sesuai dengan kebutuhan.

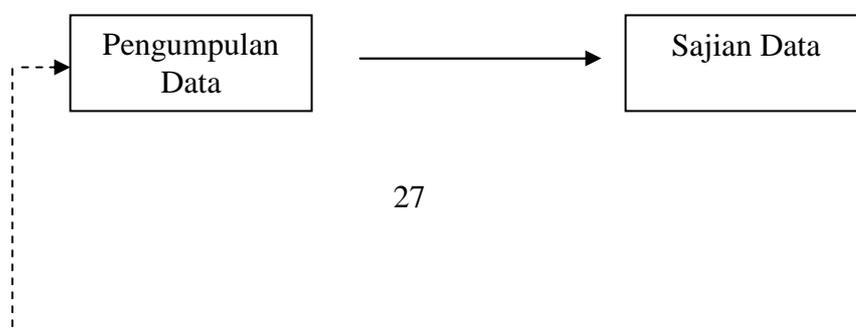
Selain itu peneliti juga menggunakan *teknik triangulasi* untuk lebih memvalidkan data (Paton, 1980: 100). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Pertama, triangulasi sumber, yakni mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. Dalam hal ini, untuk memperoleh data tentang kebijakan pendidikan inklusif misalnya, maka data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan para pengambil kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kepala sekolah, bahkan guru dan siswa. Kedua, triangulasi metode, yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam hal ini untuk memperoleh data, maka digunakan beberapa sumber dari hasil wawancara, mencatat dokumen, dan juga melalui observasi. Ketiga, triangulasi teori untuk menginterpretasikan data yang sejenis. Data tentang kebijakan inklusif misalnya, digali dari beberapa teori tentang kebijakan, pendidikan, budaya, dan psikologis.

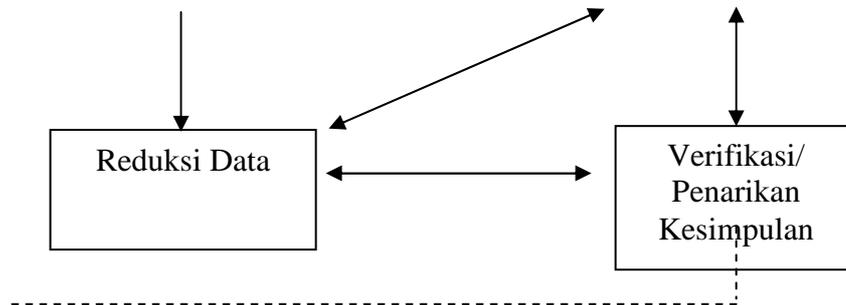
F. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis interaktif* (Miles dan Huberman, 1984). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus hingga membentuk sebuah siklus. Dalam proses ini aktivitas peneliti bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan data selama proses ini masih berlangsung. Selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara tiga komponen analisis tersebut, sehingga membentuk pola siklus.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Secara sederhana dapat dijelaskan dengan “reduksi data” dan perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti halnya melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan, menggolongkannya dalam suatu pola atau kategori yang lebih luas dan sebagainya. Sementara itu penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis interaktif. Suatu penyajian, merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan (Paton, 1983:20).

Dengan demikian, model analisis interaktif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam pengumpulan data model ini, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data samapai penyusunan kesimpulan. Artinya data yang didapat di lapangan kemudian peneliti menyusun pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data dan diikuti penyusunan data yang berupa ceritera secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada saat peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data terakhir peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi berdasarkan reduksi dan sajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab dan atau belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu. Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut.





Gambar 1. Model Analisis Interaktif Milles dan Hubberman

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Profil SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta

Secara historis, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta pertama kali didirikan pada tanggal 2 Januari 1978. Rencana pendiriannya sebenarnya sudah dirintis sekitar tahun 1970. Dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan, maka pimpinan cabang Muhammadiyah Kotagede yang pada waktu itu dipimpin oleh H. Asy'ari, merealisasikan pendirian SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang sampai sekarang masih eksis.

Guru-guru SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta pada awalnya berasal dari wilayah Kotagede dan sekitarnya, namun pada tahun-tahun terakhir banyak guru-guru yang berasal dari luar daerah yang mengabdikan dirinya di sekolah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan mengembangkan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta menjadi sekolah yang dipercaya untuk mendidik dan membimbing siswa-siswanya menjadi insan muslim yang beriman, berilmu, dan beramal.

SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta telah berhasil meluluskan siswanya secara signifikan dan tidak sedikit pula mereka yang berhasil dalam pekerjaannya yakni sukses menjadi sarjana, ABRI, PNS, guru, karyawan instansi pemerintah dan swasta. Mereka setidaknya telah

berhasil mengemban amanah sekolah untuk mengamalkan disiplin ilmunya.

Untuk meningkatkan mutu, maka SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta terus berusaha menambah sarana dan prasarana pendidikan, antara lain menambah alat-alat laboratorium IPA, buku-buku perpustakaan, alat keterampilan, komputer, foto grafis, sablon, dan lain-lain. Dengan harapan agar setelah lulus siswa dapat mandiri dengan bekal yang telah diterimanya dimasa sekolah, apabila mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Di samping itu, juga terus diupayakan peningkatan pelayanan administrasi. Langkah yang ditempuh seperti mengirim karyawan untuk mengikuti penataran antara lain penataran perpustakaan dan laboran yang diselenggarakan oleh Kanwil Depdikbud Propinsi DIY maupun instansi lainnya.

Bidang pelayanan kesehatan dan keselamatan guru, karyawan maupun siswa, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta mengadakan kerjasama dengan puskesmas Kotagede dan Dana Sehat Muhammadiyah (DSM) PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kesemuanya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Persaingan dalam dunia pendidikan khususnya pencarian jumlah siswa, mengharuskan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta mencoba terus melakukan terobosan. Sebagai contoh, tanpa mengurangi dan menghilangkan identitasnya sebagai sekolah yang berbasis Islam maka SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta mengambil langkah yang mendasar, berani, dan penuh perhitungan untuk meliburkan diri dari hari Jumat menjadi hari Ahad mulai tahun pelajaran 1991-1992.

Strategi seperti ini dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensinya, dengan pertimbangan bahwa pada hari Jumat umat Islam melaksanakan ibadah Shalat Jumat sehingga warga sekolah bisa lebih khusyuk dalam menjalankannya. Keputusan ini diambil juga atas pertimbangan untuk mengurangi adanya siswa yang membolos dan tidak masuk sekolah pada hari Ahad. Demikian pula dengan guru dan karyawan

yang sering tidak masuk pada hari Ahad dengan alasan karena ada keperluan keluarga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, prosentase tidak masuk bagi siswa, guru, dan karyawan dapat diminimalisir.

Sejak tahun ajaran 1995/1996 sampai sekarang, jumlah kelas semakin meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kepercayaan dari masyarakat pada SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta untuk mendidik dan membimbing putra-putrinya dalam menggapai cita-cita. Adapun dari segi kepemimpinan, dari awal berdirinya sampai sekarang, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta telah mengalami 7 kali kepemimpinan kepala sekolah di mana sekarang ini kepala sekolah dipegang oleh bapak Drs Slamet Fauzan.

2. Sejarah Pendidikan Inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta

Pendidikan Inklusif merupakan perkembangan terkini dalam dunia pendidikan bagi anak berkelainan, yang kemudian secara formal ditegaskan dalam deklarasi Salamanca, UNESCO 1994, oleh para menteri pendidikan se-dunia. Deklarasi ini sebenarnya merupakan penegasan kembali atas deklarasi PBB tentang hak asasi manusia (HAM) tahun 1948.

Konsep pendidikan inklusif telah dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta sejak tahun 1979 atau sudah berjalan selama 28 tahun. Namun demikian, sosialisasi tentang pendidikan inklusif baru ditegaskan pada bulan Mei 2004 di Cisarua, Bogor, oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Departemen Pendidikan Nasional. Konsep pendidikan inklusif merupakan perkembangan dari Sistem Pendidikan Luar Biasa dan kemudian berkembang menjadi sekolah terpadu.

Pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta dimulai jauh sebelum adanya sosialisasi dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa, bahkan sebelum dikeluarkannya deklarasi Salamanca (UNESCO 1994). Berdasarkan wawancara dengan Kepala SMA Muhammadiyah 4

Yogyakarta, diperoleh penjelasan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di sana. Sebagai penjas, demikian hasil wawancara tersebut. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta telah melaksanakan pendidikan inklusif, tepatnya pada tahun 1979 dengan menerima siswa yang memiliki kekurangan fisik yaitu Tuna Daksa, yang lulus tahun 1982. Pada tahun 1990, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta juga menerima seorang siswa lumpuh yang lulus pada tahun 1993. Tahun 1997, sekolah juga menerima siswa Tuna Netra, namun tidak sampai tamat karena harus segera menikah, bahkan untuk tahun 2000 sampai dengan 2007, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta telah menerima siswa yang memiliki kekurangan atau kecerdasan luar biasa sebanyak 12 orang (Fauzan, *wawancara*, 18 Januari 2007).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, pada awalnya bukan karena ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Pusat ataupun Propinsi. Dinas pendidikan Pusat ataupun Propinsi sendiri tidak pernah menunjuk SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta sebagai sekolah penyelenggara kelas inklusif, karena penyelenggaraan kelas inklusif sendiri merupakan kebijakan dari sekolah sebagai pihak yang siap dan mau menyelenggarakan program pendidikan inklusif (Suparno, *wawancara*, 17 Januari 2007). Sebelumnya SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta tidak mengetahui adanya program kelas inklusif. Pada akhirnya, sekolah merasa senang dengan menerima siswa yang memiliki kekurangan atau kecerdasan luar biasa, karena pada dasarnya sekolah tidak pernah memberikan syarat tertentu bagi siswa yang akan belajar dan menuntut ilmu di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta.

3. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Adapun landasan atau dasar diselenggarakan pendidikan inklusif sebagai berikut.

a. Faktor Religi (Agama Islam)

Faktor religi yang digunakan untuk penjelasan ini adalah Al-Hujurat: 13 yang artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Al-Hujurat: 13).

Ayat di atas memberikan perintah kepada kita, agar kita saling *ta'aruf*, yaitu saling mengenal dengan siapapun, tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, bangsa dan bahkan agama. Inilah konsep Islam yang begitu universal, yang memandang kepada semua manusia di hadapan Allah adalah sama, justru hanya tingkat ketaqwaannya yang menyebabkan manusia mulia dihadapan Allah. Secara jelas, pernyataan ini bersumber dari *Q. S. Al-Maidah: 2* yang artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.*

Ayat di atas juga memberikan perintah kepada kita agar kita memberikan pertolongan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang keluarga dan dari mana ia berasal, lebih-lebih mereka yang mengalami keterbatasan atau kecacatan fisik, sebagai contoh Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Grahita, dan Tuna Laras.

b. Landasan Filosofi

Landasan filosofi pelaksanaan pendidikan inklusif adalah Pancasila, yang mempunyai lima pilar sekaligus cita-cita luhur. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan fondasi diselenggarakannya pendidikan inklusif, filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebhinekaan manusia, baik kebhinekaan vertikal seperti perbedaan kecerdasan, kekuatan fisik, ekonomi dan lain-lain, sedangkan

kebhinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, tempat tinggal, agama dan aliran politik.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO 1994) yang telah disepakati oleh para Menteri Pendidikan se-dunia, dan merupakan penegasan kembali atas Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM tahun 1948. Di Indonesia sendiri penerapan pendidikan inklusif telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah Khusus.

Dengan melihat landasan yuridis tersebut, maka tidak ada kata menolak bagi sekolah-sekolah reguler untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun realita yang terjadi, banyak sekolah-sekolah yang tidak mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus tersebut, dengan berbagai alasan. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta sendiri sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sampai saat ini belum secara resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) Penunjukan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta menganggap bahwa Surat Keputusan (SK) Penunjukan bukanlah sebagai tujuan, yang terpenting adalah nilai ibadah dengan mendidik mereka (Anak Berkebutuhan Khusus). Namun juga terbersit harapan kiranya pemerintah lebih memperhatikan lagi (Drs. Slamet Fauzan, 2006: 2-3).

4. Faktor Pendukung

- a. Dukungan dari Bapak, Ibu, Guru, Karyawan dengan menerima kedatangan mereka (ABK) serta memberikan bimbingan-bimbingan

dan layanan sebagaimana siswa yang lain, bahkan bimbingan dan layanan khusus.

- b. Dukungan para siswa dan siswi, yang menerima kehadiran mereka duduk bersama, belajar bersama bahkan menolong, menuntun serta mengajak mereka dalam berbagai kegiatan.
- c. Dukungan masyarakat sekitar, yang agamis sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus sebagai anak perlu diberi perhatian khusus.
- d. Dukungan dari Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Propinsi yang telah memberikan bantuan, walaupun masih sangat minim.
- e. Ruang belajar atau ruang kelas serta lapangan/tempat olah raga yang standar dan memadai.

5. Faktor Penghambat.

- a. Guru-guru di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta belum semuanya mengikuti penataran atau *workshop* tentang prosedur mengajar atau memberikan pelayanan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- b. Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang hanya berjumlah dua orang serta tidak bisa setiap hari datang ke sekolah (hanya 3 hari) menjadi salah satu kendala, bahkan Guru Pembimbing Khusus tidak bisa menguasai seluruh mata pelajaran.
- c. Ruang bimbingan khusus yang belum memadai, selama ini bimbingan dilaksanakan di ruang Bimbingan dan Konseling (BK). Bukan hanya itu prasarana lain seperti komputer juga belum memadai, sekarang ini sekolah hanya memiliki satu komputer untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) itupun masih gabung penggunaannya dengan guru bimbingan dan konseling (BK).

6. Kelebihan Pendidikan Inkusif

- a. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta bisa beribadah lewat pendidikan, apalagi bisa mendidik anak-anak yang oleh orang lain atau masyarakat dianggap cacat. Justru kita bisa lebih banyak belajar dari mereka, kita sebagai manusia sebenarnya lemah dan tidak sempurna terutama dalam ibadah (spiritual), mereka ternyata lebih khusyuk dan lebih tertib dari siswa normal.
- b. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta bisa berbangga diri karena ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mengikuti berbagai perlombaan seperti gerak jalan, catur, pidato, dan lain sebagainya, bahkan dalam Lomba Nasyid tingkat Kota Yogyakarta pernah menjadi juara II.
- c. Anak-anak Berkebutuhan Khusus ternyata bisa lulus dan banyak diantara mereka yang masuk ke Universitas Negeri dan hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah.
- d. Sekolah menjadi lebih mengenal tentang Anak-anak Berkebutuhan Khusus, lebih banyak wawasan lewat sosialisasi dan diklat yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa (PLB).

7. Kekurangan Pendidikan Inklusif

- a. Belum bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada mereka (ABK) terutama dalam bidang sarana dan prasarana pembelajaran seperti laboratorium, komputer, perpustakaan khusus, ruang bimbingan khusus, dan lain sebagainya.
- b. Perhatian Pemerintah masih terfokus terhadap anak-anak normal atau sekolah-sekolah favorit yang memang secara akademis bisa dibanggakan.
- c. Dari segi kemampuan akademik kebanyakan siswa yang sekolah di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta adalah mereka yang tidak diterima di SMA Negeri.

8. Kegiatan Pendukung Pelayanan

- a. Memberikan sosialisasi kepada bapak/ibu guru dan karyawan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- b. Mengadakan sosialisasi kepada semua siswa tentang sekolah inklusif, dimana anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK) merupakan bagian dari mereka.
- c. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan orang tua siswa, terutama dilakukan saat dalam kegiatan-kegiatan formal yang dilakukan oleh sekolah seperti pengajian, rapat tahunan sekolah, pengambilan raport, dan lain sebagainya.
- d. Mengadakan pelatihan guru-guru terutama guru matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan bahasa dalam rangka pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku-buku braille, serta pelatihan komputer bagi siswa Tuna Netra.
- e. Adapun buku-buku dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sudah bisa diselesaikan dalam bentuk braille adalah buku matematika, buku fisika, buku biologi, buku bahasa Inggris, dan kamus bahasa Inggris yang sudah di instool kedalam komputer dengan program JAWS.
- f. Pembuatan buku-buku dan Lembar Kerja Siswa (LKS) dikerjakan oleh SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta bekerja sama dengan Resours Center (RC) Dria Manunggal, Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Yogyakarta dengan dana bantuan dari Direktorat Pendidikan Menengah Umum Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

B. Analisis

Penyandang cacat atau kelainan sering dipandang sebagai sebagai warga negara yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Mereka sering dianggap sebagai manusia yang lemah dan rendah mobilitasnya. Pola pikir masyarakat yang sudah terkonstruksi secara sosial terhadap penyandang cacat atau kelainan terutama dalam segi kemandirian. Pola pikir masyarakat

yang salah dalam memandang para penyandang cacat atau kelainan telah membuat mereka (para penyandang cacat atau kelainan) menjadi kaum yang terpinggirkan dan bahkan sikap masyarakat yang demikian menjadikan mereka (penyandang cacat) menjadi rendah diri dan pesimis dalam menghadapi orang lain. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi karena penyandang cacat atau kelainan merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang sewajarnya.

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus yaitu mereka yang memiliki keterbatasan pada penglihatan atau tuna netra (blind and low vision), tuna rungu-wicara (bisu tuli), tuna grahita (ringan, sedang, berat), slow learned (lambat belajar), learning difficulties (kesulitan belajar), tuna daksa (cacat tubuh), autistik, tuna ganda (double handicap), tuna laras (gangguan sosial emosional), gifted (cerdas istimewa), dan talented (berbakat) (Wiji Suparno, 2006: 2). Pendidikan inklusif merupakan suatu terobosan baru dalam dunia pendidikan yang memungkinkan dan memberi kesempatan bagi anak yang berkelainan atau memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk bisa belajar bersama dalam suatu kelas atau lingkungan pendidikan dengan anak normal. Artinya pendidikan diberlakukan bagi semua siswa tidak mengenal pembedaan baik secara fisik maupun mental.

Sejarah pendidikan inklusif pada awal rintisannya bernama sekolah terpadu. Di Indonesia sendiri secara resmi dimulai tahun 1986. Sekolah terpadu memiliki filosofi bahwa anak bisa bersama minimal secara fisik untuk menghindari adanya segregasi, sedangkan inklusif mempunyai filosofi bahwa semua anak itu adalah sama sehingga mereka harus dihargai dan diperlakukan secara sama dan wajar (Suparno, wawancara, 17 Januari 2007).

Perbedaan integrasi dan inklusif yaitu Integrasi approach ciri-cirinya antara lain terpusat pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), assessment untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), diaknosa Hasil (*out come*), program untuk Siswa, penempatan kepada program yang sesuai, kebutuhan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), penggantian/perubahan dan remediasi mata pelajaran, keuntungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK), dukungan formal dan ahli khusus, intervensi secara teknis (herapish, tenaga ahli, guru khusus, dan lain sebagainya). Sedangkan inclusion approach ciri-cirinya antara lain yaitu terpusat pada kelas, evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), collaborative problem solving, strategi untuk guru, adaptasi dan bantuan untuk lingkungan kelas secara umum, hak semua anak/siswa, perubahan bagi sekolah, keuntungan bagi semua siswa, dukungan informal dan keahlian bagi guru dalam kerja team, pembelajaran yang bagus untuk semua .

Pendidikan inklusif mensyaratkan adanya kurikulum yang fleksibel artinya bahwa kurikulum disesuaikan kondisi siswa, misalnya untuk pelajaran olahraga, tidak mungkin siswa tuna netra mengikuti kegiatan sepak bola, maka guru dapat membuat kebijakan siswa tersebut tidak perlu mengikuti kegiatan sepak bola, tapi siswa tuna netra tersebut cukup membuat tugas saja atau diberi pemahaman teori. Bukan hanya kurikulum saja tetapi juga dalam hal penilaian, alokasi waktu yang tepat artinya siswa yang memiliki kelainan seyogyanya diberi kesempatan untuk bisa mencapai tujuan belajar. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sangatlah berat, butuh kerja keras dan kerjasama semua pihak baik dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah

Di Yogyakarta sendiri sekolah yang sudah menyelenggarakan program inklusif yaitu ada sekitar 63 sekolah, seperti TK Sedayu dan TK Masitoh, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, SMK Pembangunan, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SD Giwangan, SD Gejayan, SD Nitikan, di Gunung Kidul ada 22 sekolah, di Bantul 21, di Kulonprogo ada 6, dan di Sleman ada 10. Namun sebenarnya ada lebih dari 63 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, tetapi mereka (sekolah) banyak yang belum melapor ke Dinas Pendidikan.

Sebenarnya tidak ada standar/kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tergantung dari kesediaan sekolah itu sendiri. Pendidikan inklusif bisa diselenggarakan kalau sekolah merasa siap dan mampu menyelenggarakannya. Dinas pendidikan

atau pemerintah tidak pernah memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Peranan Dinas Pendidikan Propinsi DIY sendiri adalah sebagai sentra pembina pelaksanaan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan mengusahakan guru khusus (guru pendidikan luar biasa) dan mendidik guru PLB agar siap diterjunkan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, selain itu Dinas Pendidikan juga mendidik guru-guru umum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka lebih siap dalam mendidik siswa dikelas inklusif yang notabene mempunyai siswa heterogen.

Kendala-kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada empat. *Pertama*, kendala-kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana-prasarana, dan kondisi keuangan. *Kedua*, yaitu psikologi baik dari masyarakat maupun guru. *Ketiga*, value yaitu penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Keempat*, power yaitu hambatan-hambatan dari penguasa, misalnya penguasa membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dengan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah mengenai pendidikan inklusif agar semua orang mengetahui dan paham mengenai pendidikan inklusif, sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki kelainan (cacat).

PENUTUP

Pendidikan inklusif merupakan salah satu model pendidikan yang dirancang secara khusus, dan merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk menghindari adanya segregasi. Demikian juga proses pembelajaran dikelas inklusif, walaupun siswanya heterogen, tidak ada perbedaan yang begitu berarti dengan proses pembelajaran di kelas reguler. Menurut peneliti dalam penelitian ini proses pembelajaran sejarah di kelas inklusif dapat dikatakan cukup berhasil, dan keberhasilan dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dari guru, siswa, lingkungan, dan sarana-prasarana.

Faktor dari guru yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesionalisme. Dengan kompetensi yang dimiliki guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat, metode yang digunakan, media, juga evaluasi. Guru juga harus menjadi contoh yang baik bagi siswanya, maka dari itu seorang guru hendaknya mempunyai perilaku yang santun, arif, dan bijaksana. Guru juga dituntut untuk profesional terhadap profesinya, selain itu guru harus dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah.

Faktor dari siswa yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda sehingga output yang dihasilkan pun antara siswa satu dengan yang lain akan berbeda pula. Keberadaan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya ada saling ketergantungan, tetapi disini bukan ketergantungan dalam arti yang negatif tetapi ketergantungan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Rasa empati yang begitu besar dari anak normal terhadap siswa penyandang cacat menjadi sebuah kekuatan besar untuk kelancaran dalam proses pembelajaran. Terutama dalam hal-hal yang sifatnya teknis, siswa normal banyak membantu siswa penyandang cacat untuk dapat mencapai tujuan belajarnya, misalnya dengan

bersedia mendiktekan materi yang ditulis guru dipapan tulis untuk ditulis siswa penyandang cacat yang dalam hal ini anak tuna netra dalam huruf braille. Keberhasilan siswa yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya didukung dengan menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan kondisi diri. Memahami kondisi diri yaitu ditunjukkan dengan memahami kapan waktu-waktu yang tepat untuk belajar. Hal ini dikarenakan belajar bukan hanya proses menghafal saja tetapi memahami dan memaknai apa yang diperoleh.

Faktor lainnya adalah lingkungan, letak SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, yang menurut peneliti cukup strategis, berada jauh dari keramaian kota, sehingga sangat mendukung sekali bagi berlangsungnya pembelajaran. Selain itu dukungan keluarga yang merupakan salah satu bagian dari lingkungan juga memiliki andil besar dalam menyukseskan pembelajaran. Perhatian orang tua dalam lingkungan keluarga sangat penting terutama dalam memberikan pengalaman pertama pada anak-anak karena pengalaman pertama merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi dan emosional anak sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh anak.

Faktor yang terakhir adalah sarana-prasarana baik itu ruang kelas, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling (BK), dan ruang multimedia. Ruang kelas dirancang sebaik mungkin, sekondusif, dan nyaman mungkin, agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Kebersihan, keindahan, kerapian, pencahayaan, sirkulasi udara menjadi perhatian khusus dalam upaya menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selain itu hal-hal lain yang dianggap sepele akan menghambat proses pembelajaran jika keberadaannya tidak diperhitungkan, seperti papan tulis, meja, kursi, kapur, dan lain sebagainya. Perpustakaan sebagai ladangnya ilmu pengetahuan juga tidak boleh dikesampingkan keberadaannya, karena di perpustakaan inilah sumber-sumber yang dipakai sebagai pendukung pembelajaran sejarah berada, seperti peta, gambar, majalah, maupun surat kabar. Maka tidak dapat

dipungkiri bahwa perpustakaan merupakan salah satu faktor pendukung pembelajaran.

Ruang bimbingan dan konseling (BK), juga menjadi salah satu ruangan penting yang mendukung proses pembelajaran. Ruangan ini lebih dikhususkan sebagai ruangan bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dalam hal ini dikhususkan bagi siswa tuna netra. Ruangan ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang diperuntukan bagi siswa tuna netra, menurut peneliti bisa dikatakan sebagai perpustakaan mini karena disitu terdapat komputer khusus tuna netra, walaupun penggunaannya sering bergantian dengan guru BK, sebagai alat administrasi, mesin ketik braille, Al-Qur'an braille, dan buku-buku braille walaupun sangat minim sekali.

Ruang multimedia adalah ruangan yang dirancang dan digunakan khusus untuk proses pembelajaran karena dilengkapi dengan alat elektronika sebagai media pembelajaran, misalnya sebagai tempat pemutaran film sejarah, yang menjadi salah satu media pembelajaran untuk menghindari kejenuhan siswa. Selama proses pembelajaran sejarah berlangsung ada kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut bisa yang sifatnya teknis maupun yang non teknis yang berasal dari guru, siswa, maupun dari sarana prasarana pendukung pembelajaran. Kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran sejarah adalah kendala dari dalam diri yaitu kondisi emosional, ada kalanya guru berada dalam situasi titik jenuh dan pada saat-saat tertentu juga guru ada pada situasi tinggi, sehingga guru harus dapat mengatasi kondisi kejiwaannya dan disini keprofesionalan guru harus ditunjukkan; penguasaan huruf braille juga menjadi kendala bagi guru sejarah, sehingga peran guru pembimbing khusus sangat dibutuhkan sebagai penerjemah huruf braille kedalam huruf awas.

Kendala lainya yaitu masalah alokasi waktu, materi sejarah yang begitu banyak sedangkan waktu terbatas, sehingga guru dituntut harus sekreatif mungkin agar materi dapat disampaikan secara maksimal. Selain itu kendala dalam pembelajaran sejarah yaitu masalah sarana-prasarana yang terbatas yang dalam hal ini dikhususkan pada buku penunjang pembelajaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala emosional guru dengan membangun situasi kondusif dikelas sehingga guru dapat melupakan sejenak masalah yang dihadapinya, mengenai penguasaan huruf braille, perlu diakui bahwa untuk dapat mengetahui dan paham terhadap huruf braille dibutuhkan kecermatan dan ketelitian, jadi langkah yang diambil guru dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memaksimalkan peran guru khusus untuk membantu menerjemahkan huruf braille ke dalam huruf awas, dan sebaliknya dari huruf awas ke huruf braille. Kemudian masalah alokasi waktu, guru selalu memberi kesempatan bagi siswa untuk mencari sumber-sumber belajar lain dari perpustakaan untuk melengkapi materi yang disampaikan oleh guru dikelas. Sedangkan untuk masalah sarana-prasarana, yang dalam hal ini dikhususkan adalah masalah buku, guru mensiasatinya dengan membuat modul dikarenakan buku penunjang sebagai sumber belajar siswa masih sangat kurang. Modul ini berisi ringkasan mengenai materi pelajaran sejarah selama satu semester agar siswa lebih mudah dalam belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Banathy, Bela H. 1992. *A Systems View of Education: Concepts and Principles for Effective Practice*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Budiono dan Ella Yulelawati. 1999. "Penyusunan Kurikulum Berbasis Kemampuan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No.019, Tahun Ke-5 Oktober 1999*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- Conny Semiawan. A.s. Munandar. S.C. Utami Munandar. 1987. *Memupu Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah. Petunjuk Guru dan Orang Tua*. Jakarta: Gramedia.
- Dalyono.M. 2001. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Davidoff, LL. 1988. "Introduction To Psychology", alih bahasa Mari Juniati, *Psikologi Suatu Pengantar Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Freire, Paulo. 1999. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krippendorff, Klaus. 1991. Content Analysis: Introduction Its Theory and Methodology", Alih Bahasa Farid Wajidi, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali.
- Margaret. E Bell. Gredler. 1994. Learning and Instruction. Alih bahasa Munandir. *Belajar dan membelajarkan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications.
- Moleong, L.J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhadjir, Noeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhadjir, Noeng. 2006. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial: Sustainability dalam Social Construc*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Patton, M.Q. 1980. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, CA.: Sage Publication.
- Sardiman A. M. 2001. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali.
- Slameto. 1988. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Bina Aksara.

- Suharsimi Arikunto. 1998. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Saylor, J.G. 1981. *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning, Fourth Edition*. Japan: Holt.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York, N.Y.: holt, Rinehart, and Winston.
- Suparno, Wiji. 2006. *Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif Sebagai Persiapan Menuju Sekolah Inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta*. Yogyakarta: PPS UNY.
- Suparno, Wiji. 2006. *Paradigma Baru Pembinaan Sekolah Luar Biasa*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
- Suparno, Wiji. 2006. *Sosialisasi Pendidikan Inklusif: Beberapa Alternatif Pendidikan Bagi Penyandang Cacat atau Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan Provinsi DIY.
- Sutopo, H.B. 1995. *Kritik Seni Holistik Sebagai Model Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Sutopo, H.B. 1996: *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Jurusan Seni Rupa Fakultas Sastra UNS.
- Waluyo, H.J. 2000. "Hermeneutik Sebagai Pusat Pendekatan Kualitatif", dalam *Historika*, No.11. Surakarta: PPS UNJ KPK UNS.
- Winataputera, US. 1992. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Depdikbud.
- Yin, R.K. 1987. *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.